



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI  
DENGAN SETJEN MPR RI TERKAIT MASUKAN PERATURAN DPR TENTANG  
SISTEM PENGAMANAN DI LINGKUNGAN GEDUNG PARLEMEN  
TANGGAL 3 JUNI 2015**

---

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 5 (lima).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Hari/tanggal	: Rabu, 3 Juni 2015.
P u k u l	: 10.55 s/d 12.15 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Menerima masukan/pandangan dari Sekretariat Jenderal MPR RI tentang Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung Parlemen.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyono, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH.,M.H.
Hadir	: 38 orang, izin 13 orang dari 74 orang Anggota.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Sekretariat Jenderal MPR RI dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.55 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Sekjen MPR RI atau yang mewakili untuk memberikan masukan/pandangan mengenai Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung Parlemen.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Setjen MPR RI memberikan masukan/pandangan mengenai sistem pengamanan di lingkungan gedung Parlemen, sebagai berikut :
1. Sekretariat Jenderal MPR RI mempunyai jumlah tenaga pengamanan sebanyak 40 (empat puluh) orang yang terbagi menjadi 4 regu pengamanan, dengan status kepegawaian tenaga pengamanan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer.
  2. Tenaga pengamanan Setjen MPR RI melakukan tugas pengamanan di Gedung Nusantara III lantai 5, 6, 7 dan 9, Gedung Nusantara V, ruang GBHN, Gedung Pustakaloka serta Gedung Wahana Graha.
  3. Fokus pengamanan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI dilakukan pada ruangan-ruangan Pimpinan MPR RI.
  4. Untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh MPR RI, baik yang bersifat internal maupun nasional, terkait dengan pengamanannya selalu berkoordinasi dengan pihak pengamanan DPR dan DPD RI.
  5. Sekretariat MPR RI menginginkan adanya sistem pengamanan yang terpadu dan terintegrasi mengingat jumlah personil pengamanan yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal MPR RI masih belum memadai.
- B. Tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari Setjen MPR RI tentang sistem pengamanan di lingkungan gedung Parlemen, sebagai berikut:
1. Lingkungan gedung parlemen terdiri dari 3 (tiga) lembaga yaitu MPR, DPR dan DPD RI, untuk itu rapat pada hari ini adalah untuk mendapatkan masukan/pandangan dari Sekretariat Jenderal MPR RI terkait dengan sistem pengamanan yang saat ini diberlakukan di lingkungan gedung parlemen, khususnya di lingkungan gedung MPR RI.
  2. Diharapkan kepada para media masa baik cetak maupun elektronik, kiranya dapat memberikan informasi yang benar dan menyeluruh, agar tidak terjebak dalam isu/polemik adanya pembentukan "Polisi Parlemen".
  3. Sebelumnya Badan Legislasi sudah mengundang Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memberikan masukan/pandangannya mengenai sistem pengamanan di lingkungan gedung parlemen dan sore ini akan mengundang Sekretariat Jenderal DPD RI untuk hal yang sama.
  4. Masukan-masukan tersebut diperlukan untuk merumuskan suatu peraturan mengenai sistem pengamanan di lingkungan gedung parlemen tanpa mengurangi jumlah personil pengamanan, mengingat sulitnya mengatur pengamanan di lingkungan gedung parlemen karena terdapat 3 komando yang berasal dari 3 lembaga yang berbeda.
  5. Sekretariat Jenderal MPR RI hanya mengelola bagian yang sedikit dari kompleks Parlemen, namun tidak mengurangi kewajibannya dalam rangka menjaga keamanan di lingkungan gedung parlemen, oleh karena itu kiranya Setjen MPR RI dapat melakukan reformasi atas sistem pengamanannya.
  6. Sistem pengamanan di lingkungan gedung parlemen bersifat integral dan satu pintu meskipun pengendalian atas keamanan di lingkungan gedung parlemen ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu MPR, DPR, dan DPD RI.

7. Diperlukan pemetaan tentang wilayah yang perlu dilakukan pengamanan, sehingga dapat dilakukan pembagian personil pengamanan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan.
8. Perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan *Standard Operasional Procedure* (SOP) yang sudah ada dan petugas yang berwenang dapat bekerja sesuai dengan SOP-nya.
9. Dalam rangka menyusun peraturan mengenai sistem pengamanan di lingkungan gedung parlemen ini, perlu dibentuk tim kecil yang akan membuat konsep peraturan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari pengamanan di lingkungan gedung parlemen dengan menggunakan sumber daya yang sudah ada.
10. Perlu adanya pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mendidik mental perilaku dari petugas pengamanan agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada setiap orang yang berada di lingkungan gedung parlemen, tidak hanya kepada Anggota Dewan akan tetapi juga kepada masyarakat yang berkunjung.
11. Perlu meningkatkan kedisiplinan petugas pengamanan dan masyarakat umum di lingkungan gedung parlemen.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Sekretariat Jenderal MPR RI menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal MPR RI menyetujui dan akan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan sistem pengamanan terpadu di lingkungan gedung parlemen.
2. Peningkatan sistem pengamanan terpadu, tidak akan mengurangi jumlah petugas pengamanan yang sudah ada.
3. Keterampilan dan keahlian dari para petugas pengamanan perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.
4. Kesejahteraan petugas pengamanan perlu ditingkatkan, mengingat tanggung jawab dari mereka yang sangat besar.

Rapat ditutup pukul 12.15 WIB

Jakarta, 3 Juni 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001